**PENGARUH WITH HOLDING TAX SYSTEM PADA PENGUSAHA KENA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN PETISAH)**

ZULIA HANUM

Jurnal Ilmiah Ekonomikawan ISSN: 1693-7600 Edisi 11 Des 2012

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Adapun tujuan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *With Holding Tax System* yang dicerminkan dari jumlah PKP yang menyetorkan PPN terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak.

Dari hasil uji t didapat $t = 1,4965$. Bila t hitung dibandingkan dengan t tabel maka didapat t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,4965 < 2,074$). Dengan hasil tersebut maka H_a ditolak dan H_o diterima karena t hitung jatuh pada daerah penolakan H_o . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informasi jumlah PKP yang menyetorkan PPN bukanlah merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur yang baik oleh KPP Pratama Medan Petisah untuk menentukan besarnya penerimaan PPN. Hal tersebut dikarenakan perubahan PKP yang menyetorkan PPN berbeda-beda setiap bulannya, terkadang bisa meningkat dan bisa juga menurun.

Kata Kunci : With Holding Tax System ,Penerima Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Oleh karena itu, Negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban

kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Untuk tetap bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai dan Bea balik nama. Dilihat dari segi penerimaan, Pajak Penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenakan PPh. Pajak penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP namun ia tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas negara.

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut tiga sistem, yaitu *Official Assessment*, *Self Assessment* dan *With Holding Tax System*. Ketiga sistem di atas mempunyai keistimewaan masing-masing, namun yang memiliki peranan yang lebih dominan adalah *With Holding Tax System* karena diterapkan pada sistem pemungutan PPN. Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Penggunaan *With Holding Tax System* menuntut pihak ketiga yang ditunjuk untuk lebih aktif dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

KAJIAN TEORI

With Holding Tax System

Sebelum kita mengetahui *With Holding Tax System* kita harus mengetahui bahwa *With holding Tax System* merupakan salah satu sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2003, hal 11) dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak yaitu :

- 1) ***official assessment system*** merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.
- 2) ***self assessment system*** merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.
- 3) ***with holding tax system*** merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, Keputusan Presiden dan Peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Berdasarkan situs <http://pajaktaxes.blogspot.com/2008/09/withholding>

Withholding tax merupakan salah satu sistem administrasi perpajakan yang banyak diterapkan di negara lain. Sistem ini memiliki keunggulan karena pajak dibayar pada saat penghasilan diterima. Jika penghasilan sudah diterima dan digunakan, maka sudah jadi kebiasaan dimanapun bahwa kita akan berat bayar pajak. Withholding tax sering disebut PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26 dan PPh pasal 4 (2) Final. Selain itu PPN juga bagian dari withholding tax.

Sedangkan berdasarkan situs <http://www.pajakonline.com> :

Withholding tax adalah cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.

1. Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 No. 15 :

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum mengetahui pengertian Pajak Pertambahan Nilai terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pajak secara umum, yaitu ada beberapa pendapat antara lain menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH (Waluyo, 2006 hal. 3):

”Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2006, hal 11) Dasar Pengenaan Pajak diantaranya :

- 1) Harga jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-Undang PPn dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak
- 2) penggantian merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 3) nilai ekspor merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- 4) nilai impor merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPn yang dipungut menurut Undang-Undang PPn dan PPnBM.

c. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

PPN yang terutang dihiung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Adapun tarif PPN tersebut adalah :

- 1) Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPnBM.

2) Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, BKP yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

3. Pengertian STP PPN (Surat Tagihan Pajak)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

4. Mekanisme Penyetoran SSP

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Adapun dalam mekanisme penyetoran Surat Setoran Pajak terdapat sarana pembayaran dan penyetoran pajak, dimana untuk membayar/menyetor PPN dan PPnBM digunakan formulir Surat Setoran Pajak yang tersedia di Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor-kantor Penyuluhan dan Pengamanan Potensi Perpajakan (KP4) di seluruh Indonesia.

METODE PENELITIAN

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif yaitu dengan ukuran tendensi sentral yang mengukur tendensi suatu himpunan data yang mengelompok atau memusat dalam nilai numerik tertentu.

Ada 3 metode mengukur tendensi sentral yaitu :

1. Rata-rata hitung

$$\bar{X} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)}{n}$$

Artinya rata-rata dihitung dari penjumlahan tiap data, dari x_1 hingga x_n , dibagi dengan banyaknya data (n) yang ada.

2. Median
3. Modus
4. Deviasi Standar

Merupakan ukuran penyimpangan yang diperoleh dari akar kuadrat dari rata-rata jumlah kuadrat deviasi antara masing-masing nilai dengan rata-ratanya.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

Bila nilai standar deviasi relatif besar berarti data yang digunakan sebaran/variabilitasnya tinggi. Bila nilai deviasi standar relatif kecil, artinya data yang digunakan mengelompok di seputar nilai rata-ratanya dan penyimpangannya kecil.

Pengujian Hipotesis

- a. Analisa Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono, persamaan regresi linear sederhana didasarkan atas dasar hubungan fungsional maupun kausal antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen.

Model persamaannya sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Harga a dan b dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen

a = intercept/koeffisien yang menyatakan perubahan rata-rata variabel dependen (Penerimaan PPN) untuk setiap perubahan variabel independen (pertumbuhan jumlah PKP yang menyetorkan PPN)

b = angka arah atau koeffisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun variabel dependen yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) maka terjadi kenaikan, bila b (-) maka terjadi penurunan.

X = Jumlah PKP yang menyetorkan PPN sebagai variabel independent

b. Analisa Korelasi Product Moment

Analisa Korelasi Product Moment digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Rumus Korelasi Product Moment adalah :

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

n = jumlah banyak data

X_i = Jumlah PKP yang menyetorkan PPN

Y_i = Jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Harga r hitung tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai r tabel.

Ketentuan dalam Korelasi Product Moment adalah bila r hitung lebih kecil dari r tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

c. Uji Determinasi

Untuk mengetahui ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk perlu dilihat seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran yang dapat dipergunakan, dikenal dengan nama Koefisien Determinasi (R^2).

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu ukuran yang menunjukkan besar sumbangan dari variabel penjelas(X) terhadap variabel respon(Y).

Nilai koefisien determinasi dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi yang ditemukan.

$$D = r_{xy}^2 \times 100\%$$

d. Uji - t

Uji-t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel. Dengan taraf kesalahan 5% uji dua pihak dan $dk = n - 2$

Bila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat).

Sebaliknya apabila t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari jumlah PKP yang menyetorkan PPN sebagai variabel bebas (Independen) dan penerimaan PPN sebagai variabel terikat (dependen). Statistik deskriptif dari variabel tersebut dari semua PKP yang menyetorkan PPN pada KPP Pratama Medan Petisah selama periode 2008-2009 atau selama Januari 2008 s/d Desember 2009 disajikan dalam tabel berikut :

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviasi
PKP	24	1164	2093	1890.3	215.9
PPN	24	7,006,633,607	63,210,542,941	27,386,147,606.8	15,328,801,976.2

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai minimum positif. Untuk nilai maksimum, semua variabel juga memiliki nilai yang positif. Berikut ini perincian data deskriptif yang telah diolah :

a. variabel PKP memiliki nilai minimum 1164 dan maksimum 2093 dengan rata-rata PKP sebesar 1890.3 dengan jumlah sampel sebanyak 24.

b. variabel PPN memiliki nilai minimum 7,006,633,607 dan maksimum 63,210,542,941 dengan rata-rata PPN sebesar 27,386,147,606.8 dengan jumlah sampel sebanyak 24.

Dari tabel diatas dapat dikatakan angka logaritma untuk menyederhanakan pembahasan tetapi nilainya tetap akurat. Kemudian nilai tersebut dimasukkan pada tabel penolong untuk menghitung regresi linier sederhana sebagai berikut :

a. Analisa Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh withholding tax terhadap penerimaan PPN dapat digunakan rumus regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Dimana :

Y' = Subjek dalam variabel dependen (penerimaan PPN)

a = Harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien korelasi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.

Bila $b (+)$ maka naik, dan bila $(-)$ maka terjadi penurunan.

X = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu (jumlah PKP)

Untuk mencari nilai a dan b dapat dicari :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Kemudian dapat diketahui :

$$n = 24$$

$$\sum X = 45367$$

$$\sum Y = 657,267,542,563$$

$$\sum X^2 = 86,829,311$$

$$\sum Y^2 = 23,404,385,848,391,100,000,000$$

$$\sum XY = 1,265,567,328,700,930$$

Dari data diatas dapat dicari nilai a sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$a = \frac{(657,267,542,563)(86,829,311) - (45367)(1,265,567,328,700,930)}{24(86,829,311) - (45367)^2}$$

$$a = \frac{(57,070,087,863,408,500,000) - (57,414,993,001,175,300,000)}{(2,083,903,464) - (2,058,164,689)}$$

$$a = \frac{-344,905,137,766,851,000}{25,738,775}$$

$$a = -13,400,215,735.48$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{24(1,265,567,328,700,930) - (45367)(657,267,542,563)}{24(86,829,311) - (45367)^2}$$

$$b = \frac{(30,373,615,888,822,400) - (29,818,603,455,600)}{(2,083,903,464) - (2,058,164,689)}$$

$$b = \frac{555,359,285,366,820}{25,738,775}$$

$$b = 21,576,756.68$$

Dari kedua perhitungan diatas dapat diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = -13,400,215,735.48 + 21,576,756.68 X$$

Dari rumus regresi dapat disimpulkan bahwa apabila a dan b yang menunjukkan positif maka terdapat hubungan antara jumlah PKP dan penerimaan PPN tetapi jika menunjukkan negatif maka tidak ada pengaruh antara jumlah PKP dan penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Petisah. Apabila jumlah PKP mengalami peningkatan maka penerimaan PPN juga cenderung meningkat. Jika diinterpretasikan dalam angka hasil regresi dapat dijelaskan bahwa apabila jumlah PKP mengalami peningkatan atau bertambah sebesar 1 hal tersebut akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 21,576,756.68.

b. Analisa Korelasi Product Moment

$$n = 24$$

$$\Sigma X = 45367$$

$$\Sigma Y = 657,267,542,563$$

$$\Sigma X^2 = 86,829,311$$

$$\Sigma Y^2 = 23,404,385,848,391,100,000,000$$

$$\Sigma XY = 1,265,567,328,700,930$$

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{24(1,265,567,328,700,930) - (45367)(657,267,542,563)}{\sqrt{\{24(86,829,311) - (45367)^2\} \{24(23,404,385,848,391,100,000,000) - (657,267,542,563)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{(30,373,615,888,822,400) - (29,818,256,603,455,600)}{\sqrt{\{(2,083,903,464) - (2,058,164,689)\} \{(561,705,260,361,387,000,000,000) - (432,000,622,506,805,000,000,000)\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{555,359,285,366,820}{\sqrt{(25,738,775)(129,704,637,854,582,000,000,000)}}$$

$$r_{xy} = \frac{555,359,285,366,820}{\sqrt{3,338,438,490,195,580,000,000,000,000}}$$

$$r_{xy} = \frac{555,359,285,366,820}{1,827,139,428,230,800}$$

$$r_{xy} = 0,304$$

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa koefisien korelasi (r_{xy}) adalah sebesar 0,304. Melihat hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan korelasi antara variabel X dan variabel Y termasuk pada kategori rendah. Dan bila dilihat dalam r tabel untuk N = taraf signifikansi 5% atau tingkat kesalahan sebesar 5% dan derajat kepercayaan atau tingkat kebenaran sebesar 95% maka diperoleh nilai kritik sebesar 0,404 , hal tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan antara jumlah PKP dan penerimaan PPN. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah negatif dan tergolong mempunyai hubungan yang rendah yaitu sebesar 0,304 berada pada kisaran 0,20 – 0,399.

c. Analisa Uji Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN digunakan dengan menguji koefisien determinasi dengan menggunakan rumus dan perhitungan sebagai berikut :

Diketahui nilai $r_{xy} = 0,304$, maka :

$$D = r_{xy}^2 \times 100\%$$

$$D = (0,304)^2 \times 100\%$$

$$D = 0,0924$$

$$D = 9,24\%$$

Hal ini berarti bahwa varians yang terjadi pada variabel penerimaan PPN sebesar 9,24% ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel jumlah PKP. Pengertian ini sering diartikan pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN = 9,24%, dan sisanya 90,76% ditentukan faktor lain.

d. Analisa Uji t

Selanjutnya untuk mengisi signifikansi pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Petisah dengan menggunakan uji-t karena diteliti lebih kecil dari 50 tahun yaitu 2 tahun atau 24 bulan.

Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Diketahui nilai $r_{xy} = 0,304$, maka :

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk uji-t dengan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,304\sqrt{24-2}}{\sqrt{1-(0,304)^2}}$$

$$t = \frac{0,304\sqrt{22}}{\sqrt{1-0,0924}}$$

$$t = \frac{0,304(4,6904)}{\sqrt{0,9076}}$$

$$t = \frac{1,4257}{0,9527}$$

$$t = 1,4965$$

Dari hasil uji-t tersebut kemudian apakah uji-t lebih besar atau lebih kecil dari t-tabel maka dapat dicari t-tabel dimana dengan anggaran dasar bahwa :

$$N = 24$$

$$Dk = n - 2$$

$$Dk = 24 - 2 = 22$$

Jadi untuk taraf signifikansi 5% atau 0,05 dengan tingkat derajat kepercayaan 95% pada $N = 22$ maka didapat t-tabel sebesar 2,074 (lihat pada lampiran). Jadi dengan perhitungan uji-t hitung dan uji t-tabel = $1,4965 < 2,074$. Jadi dengan hasil tersebut maka H_a ditolak dan H_o diterima. Berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Petisah. Dengan demikian peningkatan jumlah PKP salah dapat meningkatkan penerimaan PPN.

D. Pembahasan

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,304. Hal ini berarti bahwa 30,4% variasi penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh jumlah PKP yang menyetorkan PPN, sedangkan 69,6% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Bila dilihat dalam r tabel untuk $N = 24$ dengan taraf signifikansi 5% atau tingkat kesalahan sebesar 5% dan derajat kepercayaan atau tingkat kebenaran sebesar 95% maka diperoleh nilai kritik sebesar 0,404, hal tersebut berarti bahwa tidak ada hubungan antara jumlah PKP dan penerimaan PPN. Dengan demikian berdasarkan pedoman memberikan interpretasi koefisien korelasi dapat dibuktikan bahwa hubungan antara variabel variabel bebas dan variabel terikat adalah negatif dan tergolong mempunyai hubungan yang rendah yang berada pada kisaran 0,20 – 0,399.

Dari analisa regresi linier sederhana didapat bahwa nilai a dan b menunjukkan negatif. Ini berarti tidak ada hubungan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN. Jika

diinterpretasikan dalam angka hasil regresi dapat dijelaskan bahwa apabila jumlah PKP mengalami peningkatan atau bertambah sebesar 1, hal tersebut akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 21,576,756.68

Sedangkan hasil dari analisa uji determinasi didapat $D = 9,24\%$. Hal ini berarti bahwa varians yang terjadi pada variabel penerimaan PPN sebesar 9,24% ditentukan oleh varians yang terjadi pada variabel jumlah PKP. Pengertian ini dapat diartikan bahwa pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN hanya sebesar 9,24% dan sisanya 90,76% ditentukan oleh faktor lain.

Analisa uji t didapat $t = 1,4965$. Bila t hitung dibandingkan dengan t tabel maka didapat $1,4965 < 2,074$. Dengan hasil tersebut maka H_a ditolak dan H_o diterima. Berarti tidak ada pengaruh signifikansi antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Petisah. Ini dikarenakan bahwa t hitung jatuh pada daerah penolakan H_o , maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang menyatakan tidak ada hubungan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN ditolak, dan hipotesis alternatif diterima.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa jumlah PKP yang menyetorkan PPN tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Dari segi teori, hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa dengan withholding tax system (yang berfokus pada jumlah PKP) yang baik akan meningkatkan penerimaan PPN. Ini dikarenakan jumlah PKP yang melapor setiap bulannya tidak akurat, bisa naik bahkan bisa turun yang disebabkan ada beberapa PKP yang tidak mempunyai aktifitas lagi. Dengan demikian diharapkan seluruh KPP yang tersebar di Indonesia perlu memperhatikan dan menerapkan sistem yang ada dengan sebaik mungkin

KESIMPULAN

1. KPP Pratama Medan Petisah adalah Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional yang dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
2. Berdasarkan hasil uji analisa koefisien korelasi didapat 0,304. Hal ini berarti bahwa 30,4% variasi penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh jumlah PKP yang menyetorkan PPN, sedangkan 69,6% dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor-faktor lain. Bila dilihat dalam r tabel untuk $N=24$ dengan taraf signifikansi 5% maka diperoleh nilai kritik sebesar 0,404. Nilai tersebut jika didasarkan pada pedoman pemberian interpretasi koefisien korelasi maka didapat hubungan antara variabel jumlah PKP terhadap variabel penerimaan PPN adalah negatif dan tergolong mempunyai hubungan yang rendah.

Sedangkan hasil dari analisa uji determinasi didapat $D = 9,24\%$. Hal tersebut berarti bahwa pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN hanya sebesar 9,24% dan sisanya 90,76% ditentukan oleh faktor lain seperti misalnya inflasi dan faktor ekonomi lainnya.

Dari hasil uji t didapat $t = 1,4965$. Bila t hitung dibandingkan dengan t tabel maka didapat t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,4965 < 2,074$). Dengan hasil tersebut maka H_a ditolak dan H_o diterima karena t hitung jatuh pada daerah penolakan H_o . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah PKP dengan penerimaan PPN.

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa informasi jumlah PKP yang menyetorkan PPN bukanlah merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dan dijadikan tolak ukur yang baik oleh KPP Pratama Medan Petisah untuk menentukan besarnya penerimaan PPN. Hal tersebut dikarenakan perubahan PKP yang menyetorkan PPN berbeda-beda setiap bulannya, terkadang bisa meningkat dan bisa juga menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Kuncoro, Mudrajad, (2003), Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Prabowo, Yusdianto, (2004), Akuntansi Perpajakan Terapan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Resmi, Siti, (2007), Perpajakan Teori dan Kasus, Buku I, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Siagian, D dan Sugiarto, (2006), Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sugiyono, (2008), Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Sukardji, Untung, (2005), Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2005, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, (2006), Perpajakan Indonesia (Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru), Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Edisi pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

<http://www.pajakonline.com>

<http://www.pajaktaxes.com/2008/09/withholding>

<http://www.konsultan-pajak.co.cc/>

aris_aviantara@yahoo.com

PAJAK KITA (Katalog Produk Aplikasi Pajak) : dp_pajak1@yahoo.co.id

<http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?lang=id&artid=1554>